



BUPATI LEBONG

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan standar harga yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3300);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong.
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebong.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lebong.
7. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak adalah Pegawai non PNS Kontrak dan Pegawai non PNS lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan SKPD.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
11. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang menjadi dasar pembuatan surat perintah perjalanan dinas.
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat daerah, pegawai negeri sipil daerah dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja kontrak.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan kinerja SKPD;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ke satuan kerja/instansi lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri atas uang harian yang diberikan secara lumpsum.
- (3) Pemberian biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari.
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 5

Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi.
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi.

Pasal 6

Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan dalam rangka:

- a. Studi banding, konsultasi dan sejenisnya.
- b. Menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya.
- c. Pengumandahan (datasering).
- d. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.
- e. Menghadapi majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadapi seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapat surat keterangan dokter guna kepentingan jabatan.
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas kedinasan.
- g. Ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas.
- h. Mengambil/menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri atas:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya transport/biaya bahan bakar minyak (BBM);
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Biaya angkutan dan pemetian jenazah.

- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan;
 - b. Retribusi yang dipungut di tempat bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi diberikan berupa uang pengganti BBM dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan VIII peraturan ini.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, pimpinan beserta anggota DPRD, PNS eselon IIa dan eselon IIb.
- (7) Biaya angkutan dan pemetian jenazah diberikan hanya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf h.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan lampiran I peraturan ini.
- (2) Dalam hal memerlukan narasumber yang berasal dari luar instansi dan perjalanan narasumber tersebut tidak mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dinas dari anggaran instansinya, maka kepada narasumber dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas dalam daerah yang besarnya disetarakan sesuai tingkat kepatutan.

Pasal 9

Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IX Peraturan ini.
- b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai biaya riil. Khusus perjalanan yang menggunakan pesawat udara, biaya tiket pesawat dari Bengkulu ke DKI Jakarta ditetapkan batas maksimal sesuai lampiran VI peraturan ini dan dibayarkan sesuai nilai tiket. Sedangkan untuk tiket pesawat selain DKI Jakarta disesuaikan dengan harga saat keberangkatan.
- c. Biaya transportasi dari bandara ke tempat penginapan dibayarkan secara lumpsum sesuai lampiran VII peraturan ini.
- d. Biaya Transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi

- e. Uang BBM untuk yang menggunakan kendaraan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran X peraturan ini
- f. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua beserta anggota DPRD dan PNS eselon IIA diberikan sebesar Rp. 200.000,- per hari perjalanan.
 - Untuk PNS eselon IIB diberikan sebesar Rp. 100.000,- per hari perjalanan.
- g. Biaya pemetaan dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan/atau menggunakan penyedia jasa.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Dalam hal biaya hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

BAB VII

PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Pasal 11

- (1) Untuk Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditanda tangani oleh Bupati sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (2) Untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, SPT ditanda tangani oleh Ketua DPRD sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Untuk Pejabat Eselon IIA, SPT ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (4) Untuk Pejabat Eselon IIB ditanda tangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau sekretaris Daerah sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (5) Untuk Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf dan PTT/TKK ditanda tangani oleh Kepala SKPD atau Kepala Bagian sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- e. Uang BBM untuk yang menggunakan kendaraan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran X peraturan ini
- f. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua beserta anggota DPRD dan PNS eselon IIA diberikan sebesar Rp. 200.000,- per hari perjalanan.
 - Untuk PNS eselon IIB diberikan sebesar Rp. 100.000,- per hari perjalanan.
- g. Biaya pemetaan dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan/atau menggunakan penyedia jasa.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Dalam hal biaya hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

BAB VII

PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Pasal 11

- (1) Untuk Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditanda tangani oleh Bupati sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (2) Untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, SPT ditanda tangani oleh Ketua DPRD sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Untuk Pejabat Eselon IIA, SPT ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (4) Untuk Pejabat Eselon IIB ditanda tangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau sekretaris Daerah sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (5) Untuk Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf dan PTT/TKK ditanda tangani oleh Kepala SKPD atau Kepala Bagian sedangkan SPD ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah kabupaten lebong Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Lampiran I : Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 15 Tahun 2014
 Tanggal : 3 April 2014

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Tarif Rata-rata Uang Harian Dalam Daerah Kabupaten										Ket
		Bupati/Ketua DPRD	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Golongan						PTT	
IV	III				II	I	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Rimbo Pengadang	260,000	250,000	240,000	240,000	225,000	200,000	175,000	155,000			
2	Lebong Selatan	240,000	230,000	220,000	220,000	205,000	180,000	155,000	135,000			
3	Lebong Tengah	200,000	190,000	180,000	180,000	165,000	140,000	115,000	95,000			
4	Lebong Utara	160,000	150,000	140,000	140,000	125,000	100,000	75,000	55,000			
5	Lebong Atas	130,000	120,000	110,000	110,000	95,000	70,000	45,000	25,000			
6	Padang Bano	250,000	240,000	230,000	230,000	215,000	190,000	165,000	145,000			
7	Bingun Kunung	220,000	210,000	200,000	200,000	185,000	160,000	135,000	115,000			
8	Lebong Sakti	220,000	210,000	200,000	200,000	185,000	160,000	135,000	115,000			
9	Amen	160,000	150,000	140,000	140,000	125,000	100,000	75,000	55,000			
10	Pelabai	135,000	125,000	115,000	115,000	100,000	75,000	50,000	30,000			
11	Uram Jaya	200,000	190,000	180,000	180,000	165,000	140,000	115,000	95,000			
12	Pinang Belapis	250,000	240,000	230,000	230,000	215,000	190,000	165,000	145,000			
13	Topos	270,000	260,000	250,000	250,000	235,000	210,000	185,000	165,000			

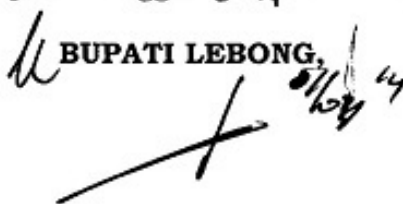
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH
 PENELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG,
 H. ROSJONSYAH

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 April 2014

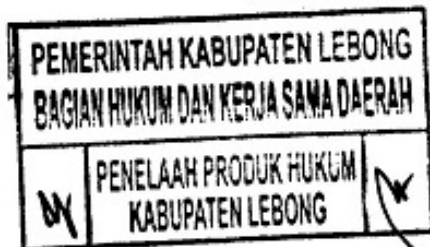

BUPATI LEBONG,
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**


H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR



Lampiran II : Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 15 Tahun 2014
 Tanggal : 3 April 2014

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2014

No	Prov/Kab/Kota dalam Provinsi	Tarif Rata-rata Transportasi dari Kabupaten ke Tempat Tujuan Dalam Provinsi Bengkulu (BBM) PP										Ket
		Bupati/Ketua DPRD	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Golongan						PTT	
1	2	3	4	5	IV	III	II	I	9	10	11	
1	Provinsi	360,000	310,000	260,000	260,000	210,000	160,000	160,000	160,000	150,000		
2	Kota Bengkulu	360,000	310,000	260,000	260,000	210,000	160,000	160,000	160,000	150,000		
3	Kab. Muko-Muko	430,000	380,000	330,000	330,000	280,000	230,000	230,000	230,000	220,000		
4	Kab. Kaur	430,000	380,000	330,000	330,000	280,000	230,000	230,000	230,000	220,000		
5	Kab. Bengkulu Selatan	370,000	320,000	270,000	270,000	220,000	170,000	170,000	170,000	160,000		
6	Kab. Kepahiang	330,000	280,000	230,000	230,000	180,000	130,000	130,000	130,000	120,000		
7	Kab. Seluma	360,000	310,000	260,000	260,000	210,000	160,000	160,000	160,000	150,000		
8	Kab. Bengkulu Tengah	350,000	300,000	250,000	250,000	200,000	150,000	150,000	150,000	140,000		
9	Kab. Rejang Lebong	310,000	260,000	210,000	210,000	160,000	110,000	110,000	110,000	100,000		
10	Kab. Bengkulu Utara	310,000	260,000	210,000	210,000	160,000	110,000	110,000	110,000	100,000		

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH
 PENYELAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH

Lampiran III : Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 15 Tahun 2014
 Tanggal : 3 APRIL 2014

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2014

No	Prov/Kab/Kota dalam Provinsi	Bupati/Ketua DPRD	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Golongan					K
					IV	III	II	I	PTT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
1	Provinsi	390,000	375,000	365,000	365,000	360,000	355,000	350,000	330,000	330,000
2	Kota Bengkulu	390,000	375,000	365,000	365,000	360,000	355,000	350,000	330,000	330,000
3	Kab. Muko-Muko	440,000	425,000	415,000	415,000	410,000	405,000	400,000	380,000	380,000
4	Kab. Kaur	440,000	425,000	415,000	415,000	410,000	405,000	400,000	380,000	380,000
5	Kab. Bengkulu Selatan	415,000	400,000	390,000	390,000	385,000	380,000	375,000	355,000	355,000
6	Kab. Kepahiang	365,000	350,000	340,000	340,000	335,000	330,000	325,000	305,000	305,000
7	Kab. Seluma	415,000	400,000	390,000	390,000	385,000	380,000	375,000	355,000	355,000
8	Kab. Bengkulu Tengah	380,000	365,000	355,000	355,000	350,000	345,000	340,000	320,000	320,000
9	Kab. Rejang Lebong	340,000	325,000	315,000	315,000	310,000	305,000	300,000	280,000	280,000
10	Kab. Bengkulu Utara	340,000	325,000	315,000	315,000	310,000	305,000	300,000	280,000	280,000

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERA SAMA DAERAH
 PENELAHH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG


 BUPATI LEBONG

 H. ROSJONSYAH

Lampiran V : Peraturan Bupati Lebong

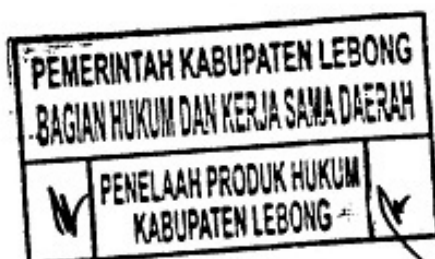
Nomor : 15 Tahun 2014

Tanggal : 3 APRIL 2014

PENENTUAN FASILITAS TRANSPORTASI TA.2014

No	Pejabat Daerah	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta AC/Bus	Lain-Lain
1	2	3	4	5	6	7
1	Bupati / Ketua DPRD	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
3	Anggota DPRD	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
4	Sekretaris Daerah	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
5	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
6	Eselon III / Gol IV	D	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
7	Eselon IV / Gol III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
8	Golongan II	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
9	Golongan I / PTT	G	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	

BUPATI LEBONG
01/04/14
T. H. ROSJONSYAH



Lampiran VI : Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 19 Tahun 2014

Tanggal : 3 April 2014

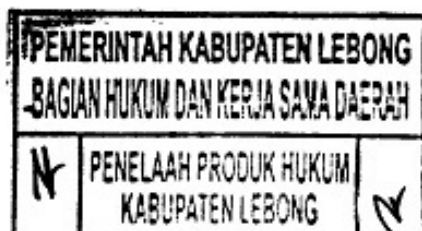
**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PULANG PERGI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE IBU KOTA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014**

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	BENGKULU	JAKARTA	4.364,000	2.621,000

Keterangan :

1. Satuan Biaya Tiket tersebut belum termasuk Airport Tax
2. Biaya tarif tiket pesawat udara bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemda Kabupaten Lebong ke Luar Provinsi Bengkulu dengan tujuan provinsi selain Ibu Kota Negara yang menggunakan transportasi Pesawat Udara untuk perjalanan pergi pulang (PP) disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada hari keberangkatan

BUPATI LEBONG
04/04/14
H. ROSJONSYAH



Lampiran VII : Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 15 Tahun 2014

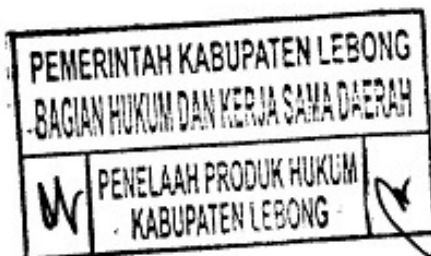
Tanggal : 3 April 2014

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI BANDARA KE PENGINAPAN TA. 2014

No	Pejabat Daerah/Eselon/PNSD/PTT	Bandara Ke Penginapan/ Hotel (PP)	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati / Ketua DPRD	420,000	
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	370,000	
3	Anggota DPRD	320,000	
4	Sekretaris Daerah	320,000	
5	Eselon II	270,000	
6	Eselon III / Gol IV	230,000	
7	Eselon IV / Gol III	180,000	
8	Golongan II	155,000	
9	Golongan I / PTT	120,000	

BUPATI LEBONG, 01/04/14

H. ROSJONSYAH



SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH/PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2014

No	Provinsi	Satuan	Tarif Rata-rata Hotel Kelas Standar Deluxe Non Suite					
			Kdh/Wkdh/ Unsur Pimpinan Dewan	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV	Golongan III	Golongan II, I dan Pegawai Tidak Tetap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nangroe Aceh Darussalam	OH	1.810,000	1.308,000	1.080,000	460,000	410,000	370,000
2	Sumatera Utara	OH	1.530,000	1.206,000	703,000	520,000	470,000	310,000
3	Riau	OH	1.900,000	1.168,000	720,000	500,000	450,000	380,000
4	Kepulauan Riau	OH	1.550,000	930,000	650,000	430,000	380,000	280,000
5	Jambi	OH	1.180,000	1.030,000	697,000	420,000	370,000	290,000
6	Sumatera Barat	OH	1.800,000	1.144,000	884,000	510,000	460,000	370,000
7	Sumatera Selatan	OH	1.410,000	1.228,000	602,000	479,000	514,000	280,000
8	Lampung	OH	1.750,000	1.299,000	770,000	424,000	374,000	356,000
9	Bengkulu (Kab dalam Propinsi)	OH						
10	Bangka Belitung	OH	1.150,000	1.150,000	850,000	501,000	533,000	304,000
11	Banten	OH	1.720,000	1.430,000	1.024,000	500,000	556,000	400,000
12	Jawa Barat	OH	1.700,000	1.753,000	949,000	510,000	497,000	463,000
13	DKI Jakarta	OH	1.700,000	1.000,000	650,000	620,000	610,000	400,000
14	Jawa Tengah	OH	1.700,000	1.452,000	750,000	500,000	450,000	350,000
15	DI Yogyakarta	OH	1.490,000	1.248,000	670,000	578,000	528,000	387,000
16	Jawa Timur	OH	1.840,000	1.359,000	841,000	440,000	485,000	286,000
17	Bali	OH	2.330,000	1.810,000	1.220,000	954,000	904,000	658,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	1.320,000	1.222,000	737,000	590,000	540,000	360,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.210,000	1.000,000	808,000	520,000	550,000	400,000
20	Kalimantan Barat	OH	1.450,000	1.130,000	923,000	480,000	430,000	330,000
21	Kalimantan Tengah	OH	1.540,000	1.596,000	816,000	490,000	465,000	436,000
22	Kalimantan Selatan	OH	1.610,000	1.603,000	816,000	550,000	500,000	379,000
23	Kalimantan Timur	OH	1.550,000	1.458,000	816,000	600,000	550,000	450,000
24	Kalimantan Utara	OH	1.400,000	1.458,000	640,000	600,000	550,000	450,000
25	Sulawesi Utara	OH	1.590,000	1.553,000	910,000	550,000	500,000	290,000
26	Gorontalo	OH	1.080,000	1.010,000	910,000	460,000	410,000	240,000
27	Sulawesi Barat	OH	1.190,000	1.030,000	910,000	450,000	400,000	360,000
28	Sulawesi Selatan	OH	1.700,000	1.135,000	853,000	545,000	539,000	375,000
29	Sulawesi Tengah	OH	1.260,000	1.298,000	767,000	450,000	400,000	330,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.250,000	1.070,000	802,000	500,000	450,000	420,000
31	Mahuku	OH	1.250,000	1.030,000	680,000	462,000	484,000	280,000
32	Mahuku Utara	OH	1.450,000	1.512,000	680,000	470,000	420,000	330,000
33	Papua	OH	1.650,000	1.524,000	720,000	510,000	460,000	380,000
34	Papua Barat	OH	1.630,000	1.482,000	900,000	450,000	400,000	370,000

BUPATI LEBONG,
 31/04/14
 H. ROSJONSYAH

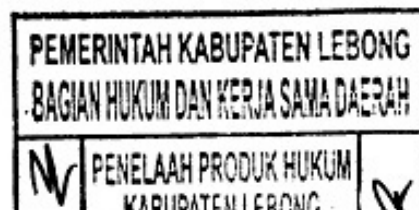
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH
 PENELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH/PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2014

No	Propinsi	Pejabat Negara/Daerah *)	Tarif Rata-rata Uang Harian Luar Daerah/Provinsi				Ket
			Golongan				
			IV	III	II	I/TKK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nangroe Aceh Darussalam	385,000	375,000	360,000	345,000	325,000	
2	Sumatera Utara	395,000	385,000	370,000	350,000	330,000	
3	Riau	385,000	375,000	360,000	340,000	320,000	
4	Kepulauan Riau	395,000	385,000	370,000	350,000	330,000	
5	Jambi	395,000	385,000	370,000	350,000	330,000	
6	Sumatera Barat	385,000	375,000	360,000	340,000	320,000	
7	Sumatera Selatan	385,000	375,000	360,000	340,000	320,000	
8	Lampung	405,000	395,000	380,000	360,000	340,000	
9	Bengkulu (Kab. Dalam Propinsi)						
10	Bangka Belitung	395,000	385,000	370,000	350,000	330,000	
11	Banten	385,000	375,000	360,000	340,000	320,000	
12	Jawa Barat	455,000	445,000	430,000	410,000	390,000	
13	DKI Jakarta	555,000	545,000	530,000	510,000	490,000	
14	Jawa Tengah	395,000	385,000	370,000	350,000	330,000	
15	DI Yogyakarta	445,000	435,000	420,000	400,000	380,000	
16	Jawa Timur	435,000	425,000	410,000	390,000	370,000	
17	Bali	505,000	495,000	480,000	460,000	440,000	
18	Nusa Tenggara Barat	465,000	455,000	440,000	420,000	400,000	
19	Nusa Tenggara Timur	445,000	435,000	420,000	400,000	380,000	
20	Kalimantan Barat	395,000	385,000	370,000	350,000	330,000	
21	Kalimantan Tengah	385,000	375,000	360,000	340,000	320,000	
22	Kalimantan Selatan	395,000	385,000	370,000	350,000	330,000	
23	Kalimantan Timur	455,000	445,000	430,000	410,000	390,000	
24	Sulawesi Utara	395,000	385,000	370,000	350,000	330,000	
25	Gorontalo	395,000	385,000	370,000	350,000	330,000	
26	Sulawesi Barat	385,000	375,000	360,000	340,000	320,000	
27	Sulawesi Selatan	455,000	445,000	430,000	410,000	390,000	
28	Sulawesi Tengah	395,000	385,000	370,000	350,000	330,000	
29	Sulawesi Tenggara	405,000	395,000	380,000	360,000	340,000	
30	Maluku	385,000	375,000	360,000	340,000	320,000	
31	Maluku Utara	395,000	385,000	370,000	350,000	330,000	
32	Papua	605,000	595,000	580,000	560,000	540,000	
33	Irian Jaya Barat	505,000	495,000	480,000	460,000	440,000	

Keterangan :

1. Pejabat Negara/Daerah *) : Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
2. Untuk Pejabat Negara dan Eselon II a diberikan uang representasi sebesar Rp. 200.000,- per hari
3. Untuk Pejabat Eselon II b diberikan uang representasi sebesar Rp. 100.000,- per hari



BUPATI LEBONG

01/09/14